IMPLEMENTASI EFEK JERA MELALUI PRINSIP KEADILAN DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh
Siti Humulhaer*)

Abstrak

Masalah penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang sering dihadapi oleh setiap masyarakat khususnya dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun demikian setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama agar didalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum, Tujuan (Pembentukan Undang-Undang 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) adalah mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif. Dengan demikian, dalam upaya untuk menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat maka hukum harus ditegakkan ditandai bahwa setiap kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum harus mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat kejahatan dan pelanggaran itu sendiri dan dalam penerapan sanksi terdiri atas berbagai macam bentuk yang bertujuan memberikan keadilan tidak saja kepada korban tetapi juga sebagai tata nilai yang merekatkan tatanan kehidupan bermasyarakat. Selain keadilan, tujuan lain dari hukum yaitu adanya kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun keadilan adalah tujuan yang tertinggi dari hukum. Kepastian hukum adalah bagian dan dibutuhkan sebagai upaya menegakkan keadilan. Dengan kepastian hukum setiap perbuatan yang terjadi dalam kondisi yang sama akan mendapatkan sanksi. Adapun kemanfaatan dilekatkan pada hukum sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat yang tentu saja tidak boleh melanggar keadilan. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Tetapi mengandung tujuan untuk pelaku jera. Yang penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi

A. PENDAHULUAN

Kegagalan Implementasi efek jera dalam penjatuhan hukuman pelaku pidana korupsi tidak merupakan pelak-

sanaan prinsip keadilan, karena banyak sekali kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian penting sumber daya negara,

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan diberikan sanksi hukuman yang tidak sesuai karena tidak menimbulkan efek jera, dan menurut Bahrudin Lopa yang menyatakan bahwa lemahnya sistem merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi diberbagai sektor,¹ dinegara tersebut karakteristik hukum sebagai norma atau kaidah selalu dinyatakan berlaku secara umum dan universal yang dikenal dengan asas *equality before the law* persamaan di depan hukum untuk siapa saja dan dimana saja dalam wilayah negara tanpa membedakan dari segi apapun atau tidak berlaku secara diskriminatif kecuali jika dalam pelaksanaannya ada oknum aparat penegak hukum dalam struktur hukum telah memberlakukan hukum itu sendiri secara diskriminatif atau tidak adanya unsur keadilan, dan dewasa ini masalah penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang sering dihadapi oleh setiap masyarakat khususnya dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi walaupun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun demikian setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama agar didalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.

Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat eksteren dan di lain pihak terdapat ketentraman pribadi interen. Demi

¹ Kristian, Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi (Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional Dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC))*, Bandung : Refika Aditama tahun 2015 hal, 57

tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Jika kepentingan itu terganggu maka hukum harus melindunginya serta setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah masalah korupsi. Korupsi semula hanya dianggap sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara, namun kemudian telah dianggap juga sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Korupsi kemudian, digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa (*Extra-Ordinary Measures*) pula, kajian terhadap kebijakan-kebijakan publik yang mendorong subur nya tindakan korupsi belum dilakukan secara sadar dan berkesinambungan. sehingga diperlukan penelitian untuk menemukan konsep kebijakan hukum pidana baru yang sesuai dengan nilai-nilai dan realitas sosial masyarakat Indonesia.²

Dengan demikian, dalam upaya untuk menjaga ketertiban kehidupan bermasyarakat maka hukum harus ditegakkan ditandai bahwa setiap kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum harus mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat kejahatan dan pelanggaran itu sendiri. Sanksi terdiri atas berbagai macam bentuk yang bertujuan memberikan keadilan tidak saja kepada korban tetapi juga sebagai

² <https://www.anakadam.com/2016/08/korupsi-dan-teori-hukum/>

tata nilai yang merekatkan tatanan kehidupan bermasyarakat.

Selain keadilan, tujuan lain dari hukum yaitu adanya kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun keadilan adalah tujuan yang tertinggi dari hukum. Kepastian hukum adalah bagian dan dibutuhkan sebagai upaya menegakkan keadilan. Dengan kepastian hukum setiap perbuatan yang terjadi dalam kondisi yang sama akan mendapatkan sanksi. Adapun kemanfaatan dilekatkan pada hukum sebagai alat untuk mengarahkan masyarakat yang tentu saja tidak boleh melanggar keadilan.

Dalam praktek penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini, pengutamaan nilai kepastian hukum lebih menonjol dibanding dengan rasa keadilan dan kemanfaatannya. Dengan demikian apabila hukum lebih mengutamakan kepastian hukum maka dengan sendirinya penagakannya akan menggeser nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum demikian pula sebaliknya. Sehingga dalam penerapannya banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum dimana masyarakat merasa kecewa dengan adanya suatu putusan hakim yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat dan hanya mementingkan penegakan hukum secara prosedural semata.

B. PEMBAHASAN

Dalam Seiring dengan kemajuan budaya dan IPTEK, Prilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Prilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada prilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma (Hukum) dan ada prilaku yang tidak

sesuai dengan norma. Terhadap prilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Prilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan Kenyamanan kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas khususnya mengenai pelaku tindak pidana Korupsi yang sampai sekarang ini masih merajalela, oleh sebab itu penanganan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus memfungsikan instrument hukum secara efektif melalui penegakan hukum (*Law enforcement*), dan melalui instrument hukum diupayakan pelaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, hal tersebut merupakan tindakan yang represif.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Tetapi mengandung tujuan untuk pelaku jera. Yang penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi bersifat nestapa yang diancam atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindakan pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitas perilaku dari pelaku kejahatan tersebut namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri, dan sanksi pidana adalah ancaman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Anselm Von Feuerbach dengan ajarannya yang dikenal dengan tekanan psikologis (*de psychologiesche dwang*), yaitu ancaman hukuman akan menghindarkan orang lain dari perbuatan jahat. Suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat bukan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak yang berwajib. Pidana adalah penderita atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu destapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik. Dan Simons Mengartikan *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Tindakan yang dapat ditempuh sebagai upaya pemberantasan tindak

pidana korupsi diantaranya sebagai berikut :

- a. Tindakan Preventif
Tindakan Preventif adalah yang dilakukan Pemerintah berupa pengawasan yang dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengawasan tersebut dikaukan terhadap aparaturnegak hukum
- b. Tindakan Represif
Dalam Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi lebih mengarah pada Tindakan represif sebab tindakan represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat, tepat, sehingga kepada para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan hukum pidana menurut Prof Dr Wirjono Prodjodikoro adalah : untuk memenuhi rasa keadilan. Lain itu menurut para sarjana hukum diutarakan, bahkan tujuan hukum pidana adalah:

1. Untuk menakut-nakuti orang jang-an sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventive*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan lagi (*special preventive*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Implementasi efek jera merupakan pelaksanaan prinsip keadilan dalam penjatuhan hukuman terhadap setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuang-

an negara atau perekonomian negara, merupakan gambaran ketentuan Pasal 2 UU No 31/1999 Tentang TPK.³

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Menurut Prof. Andi Hamzah ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu :⁴

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelanggar.

Oleh karena itulah maka teori disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu

yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

2. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Teori tentang tujuan pidana yang kedua yaitu teori relatif. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevesi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus, prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.

3. Teori gabungan (*verenigings-theorien*)

Pada dasarnya Teori gabungan adalah : gabungan kedua teori diatas. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Dengan menelaah teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembedaan adalah :

- a. Menjerakan penjahat;
- b. Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat;
- c. Memperbaiki pribadi si penjahat;

Dalam rangka mewujudkannya perlu dilakukan secara terus menerus kaitannya dengan usaha Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mencangkup hal yang berkaitan dengan pembentukan PerUndang-Undangan, Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembangan mental dan budi pekerti masyarakat, pengawasan sistem, kesejahteraan pegawai negeri, dan Pem-

³ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

⁴ Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : PT. Yarsif Watampone, (Anggota IKAPI), Tahun 2005), Hal 190.

berantasan Tindak Pidana Korupsi tanpa pandang bulu.⁵

Maka teori⁶ yang digunakan adalah teori hukum, teori hukum **Prof. Mochtar Kusumaatmadja** dan teori keadilan menurut **Aristoteles**.

Kerterlibatan hukum yang semakin aktif kedalam persoalan-persoalan yang menyangkut perubahan sosial, justru memunculkan permasalahan yang mengarahkan pada penggunaan hukum secara sadar dan aktif sebagai sarana untuk turut menyusun tata kehidupan yang baru tersebut. Hal ini tampak pada segi pengaturan oleh hukum, baik dari aspek legitimasinya, maupun aspek keefektifan penerapannya. Persoalan yang muncul tersebut dengan demikian bergeser dari bagaimana mengatur sesuatu dengan prosedur hukum, kearah bagaimana pengaturan itu sehingga dalam masyarakat akan timbul efek-efek yang memang dikehendaki oleh hukum.

Dalam suasana dimana masyarakat menghadapi perubahan sosial ekonomi yang serba cepat, perhatian tidak lagi diarahkan pada seputar penggarapan hukum sebagai suatu sistem pengaturan yang logis dan konsisten, akan tetapi hukum lebih diperkaitkan dengan perubahan-perubahan sosial. Hukum lebih tampak bukan lagi sebagai perekam kebiasaan-kebiasaan yang telah membentuk didalam bidang-bidang kehidupan masyarakat, melainkan hukum diharapkan pula untuk dapat menjadi pengungkap yang tepat

dari kekuatan-kekuatan baru yang timbul yang hendak membentuk masyarakat menurut tuntutan keadaan serta pandangan-pandangan yang baru, di dalam masyarakat dan negara yang kehidupan dan tatanannya tertib dan teratur, suatu kehidupan dan tatanan dimana titik pusat serta lingkup kegiatannya berpolakan pemeliharaan kestabilan yang dinamis dibidang sosial, politik ekonomi, dan budaya, perubahan dan ketertiban berada dan berfungsi secara bersamaan keduanya serta menjadi tujuan yang tidak dapat dipisahkan di dalam proses pembangunan.⁷

Hal tersebut sesuai dengan teori Moctar Kusumaatmadja pada intinya mengatakan bahwa hukum adalah sarana pembangunan (masyarakat dan bangsa) Bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan nilai (*values*) suatu masyarakat, karena itu melalui pembangunan hukum, nilai dan prilaku masyarakat diarahkan (diubah) ke arah yang dikehendaki. Berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perubahan nilai keadilan masyarakat yang masih kental bertumpu pada keadilan pembalasan terhadap pelaku, untuk menimbulkan efek jera yang nyata-nyata tidak lagi efektif perlu diarahkan pada nilai-nilai keadilan berdasarkan keseimbangan manfaat baik bagi masyarakat banyak, negara maupun bagi pelaku (terdakwa).⁸

⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan* Jakarta : Penerbit Djambatan. Tahun 2004. hlm 7

⁶ Satjipto Raharjo, *Mengejar keteraturan menemukan ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder), pidato mengakhiri jabatannya sebagai guru besar tetap pada fakultas hukum universitas di Ponegoro, Semarang, 15 Desember 2000, hlm 8*

⁷Bambang Sunggono, *Hukum dan kebijakan publik*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1994, hal 2

⁸ <http://yudaeka793.blogspot.co.id/2014/06/peranan-hakim-pada-proses-penemuan.html>

Teori Hukum Prof. Mochtar Kusumaatmadja⁹ “Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan”. Dan Tujuan lain hukum adalah tercapainya **Keadilan** yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana

⁹ <https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-kusumaatmadja/>

pembaharuan masyarakat” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut : “Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan”. Dalam hal ini mempunyai kaitan dengan penerapan sistem yang bersifat keadilan.

1. Teori Keadilan

Hukum dan keadilan adalah permasalahan lama akan tetapi selalu menarik pertalian antara keduanya. Meskipun secara aktual setiap kali kita dihadapkan dengan sikap kritis terhadap hukum dan keadilan, namun tidak dapat disangkal bahwa kehidupan bersama tetap memerlukan hukum dan keadilan itu. Pada dasarnya manusia selalu memerlukan keadilan, kebenaran dan hukum, karena hal itu merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi masyarakat manusia yang beradab. Keadilan adalah milik dan untuk semua orang serta segenap masyarakat dan tidak adanya keadilan akan menimbulkan kehancuran dan kecacauan keberadaan serta eksistensi masyarakat itu sendiri.

Sesuai dengan teori **Aristoteles** bahwa keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama (*Justice is done when equals are treated equally*). Keadilan ini bertujuan memelihara ketertiban

masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles pengertian keadilan itu merupakan asas pertalian dan ketertibian dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrim menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat. Kejujuran atau jujur artinya apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya apa yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedangkan kenyataan yang ada itu adalah kenyataan yang benar-benar ada. Jujur juga berarti seseorang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Untuk itu dituntut satu kata dan perbuatan, yang berarti bahwa apa yang dikatakan harus sama dengan perbuatannya. Karena itu jujur berarti juga menepati janji atau kesanggupan yang terlampir melalui kata-kata atau perbuatan. Kejujuran bersangkutan erat dengan masalah nurani. Kecurangan atau curang identik dengan ketidakjujuran atau tidak jujur, dan sama pula dengan licik, meskipun tidak serupa benar. Sudah tentu kecurangan sebagai lawan jujur.

Curang atau kecurangan artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya. Atau, orang itu memang dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa bertenaga dan usaha? Sudah tentu keuntungan itu diperoleh dengan tidak wajar. Yang dimaksud dengan keuntungan di sini adalah keuntungan, yang berupa materi. Mereka yang berbuat curang menganggap akan mendatangkan kesenangan atau keenakan, meskipun orang lain menderita karenanya, hal tersebut sangat erat kaitannya dengan pelaku tindak pidana korupsi dengan Kecurangannya menyebabkan manusia menjadi serakah. tamak, ingin

menimbun kekayaan yang berlebihan dengan tujuan agar dianggap sebagai orang yang paling hebat, paling kaya dan senang bila masyarakat di sekelilingnya hidup menderita. Orang seperti itu biasanya tidak senang bila ada yang melebihi kekayaannya. Padahal agama apapun tidak membenarkan orang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan orang lain, lebih lagi mengumpulkan harta dengan jalan curang. Hal semacam itu dalam istilah agama tidak diridhoi Allah Swt.

Lebih lanjut Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya yakni nilainya bagi masyarakat.

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran

dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. dan pembedaan ini jangan dicampur-adukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.

C. PENUTUP

Hukum merupakan lembaga sosial yang diciptakan baik untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau untuk memenuhi kebutuhan kepentingan masyarakat maupun untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu dalam

kehidupan masyarakat. Hukum merupakan sarana pengintegrasian berbagai aspek kehidupan sosial. Perbuatan korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sosial karena korupsi menciptakan kondisi diskriminatif dan mengganggu rasa keadilan masyarakat, dengan begitu untuk menanggulangi korupsi diperlukan aturan hukum dan penegakannya, yang memberikan kepastian hukum kepada setiap orang, agar keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

Setiap aparat hukum yang berusaha membongkar suatu kasus korupsi, apa lagi yang telah cukup lama dan mencakup oknum-oknum pejabat teras, maka kendala utama yang dihadapinya ialah justru datangnya dari sesama aparat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Alasan yang telah membudaya selama ini yang selalu diutarakan adalah untuk menjaga hubungan baik dan demi kerja sama ataupun demi menjaga kewibawaan antara sesama instansi. Karena itu banyak penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi yang tersendat-sendat atau malah diberhentikan sama sekali. Upaya untuk mengungkap korupsi sama sekali tidak populer karena iklim, sifat dan suasana korupsi nampaknya telah menjadi hal yang biasa; hal ini karena juga korupsi tersebut telah menjadi semacam budaya yang dapat dilakukan secara turun temurun dan berkesinambung. Penindakan terhadap perbuatan korupsi tidak banyak mendapatkan respons sehingga masyarakat bersifat apatis, apalagi karena laporan pengaduan lebih sering tidak ada tindak lanjutnya. Korupsi bukan saja bersifat personal, tetapi bahkan bersifat struktural. Dan lebih dari itu, ada yang mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi kultur atau telah membudaya.

Oleh sebab itu dalam hal pemberantasan korupsi diperlukan adanya persamaan persepsi tentang hal yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Apabila telah terdapat kesamaan persepsi dan dapat memberikan rasa keadilan dalam penerapan hukumannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi sehingga dapat menimbulkan efek jera dan Penjatuhan Pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Tetapi mengandung tujuan untuk pelaku jera. Yang penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

D. DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Atmasasmita Romli, *Aspek Hukum Nasional dan Internasional Pemberantasan Korupsi*, Proyek penulisan karya ilmiah Badan Hukum Nasional. Departemen kehakiman dan hak asasi manusia RI, Tahun 2004.

Abdussalam. H. R dan Sitompul DPM, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Penerbit Restu Agung, Tahun 2002.

Bambang, *Kamus lengkap bahasa Indonesia*, Penerbit : Victory Inti Cipta

Chazawi Adami, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Malang : Bayu Media Publishing, Tahun 2003.

Emong Sapardjaja komariyah, *Ajaran Sifat Melawan Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Peratama Bandung : Penerbit. PT. Alumni Tahun 2001.

Fadjar Abdul Mukhtie, Kata Pengantar Asshiddiqie Jimly, *Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Hukum Konstitusi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Penerbit Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Tahun 2006.

Fatkhurohman, Aminudin Dian, Sira-judin, Kata Pengantar. Fadjar A. Mukhtie. *Memahami keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*. Bandung : Penerbit PT. Citra aditya bakti. 2004.

Ganarsih Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta : Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tahun 2003.

Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

— — —, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Penerbit PT. Yarsif Watampone. Tahun. 2005.

— — —, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti. Tahun 2002.

- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Jilid I, Penerbit : Pustaka Kartini, Tahun 1985.
- Kaligis, O.C., *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*. Bandung : Penerbit, PT. Alumni Tahun 2007, Jilid Ke-Tiga.
- Koeswadji Harmien Hadiati. *Korupsi di Indonesia dari delik Jabatan KeTindak Pidana Korupsi*. Bandung : Penerbit, PT. Citra Aditya Bakti. Tahun 1994.
- Kristian, Gunawan Yopi, *Tindak Pidana Korupsi (Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional Dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC))*, Bandung : Refika Aditama tahun 2015.
- Lamintang. PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 1990.
- Loqman Loebby, *Masalah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Tahun 1996/1999.
- Marpaung Leden *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan* Jakarta : Penerbit Djambatan. Tahun 2004.
- Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : Penerbit PT. Bina Aksara. Tahun 1987.
- Muladi, *Konsep Total Enforcement dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : 8 Desember 2005.
- Mulyadi Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktikan Masalahnya*, Bandung : Penerbit PT, Alumni Tahun, 2007.
- Nurjana. IGM, *Korupsi dalam Praktek bisnis, pemberdayaan penegakan hukum, program aksi dan strategis penanggulangan masalah korupsi*, Jakarta : Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2005.
- Projodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Penerbit PT.Refika Aditama. Agustus 2003.
- Prinst Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT, Citra Aditya Bakti, Tahun 2002.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, UU No.31 Tahun 1999, Bandung : CV, Mandar Maju, Tahun 2001
- Rama Tri K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Penerbit Karya Agung.
- Reksodiputro Mardjono, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Buku Keempat cetakan pertama. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum D/H Lembaga Kriminologi Dan Universitas Indonesia Tahun 1995

- , *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Ke Tiga*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Tahun 1994.
- Saleh K. Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta : Penerbit. PT. Ghalia Indonesia. Cetakan Kelima Tahun 1983.
- Seno Adji Indriyanto, *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta : Penerbit Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum Cetakan Pertama Tahun 2001.
- , *Pidana Mati Bagi Koruptor Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi*. Jakarta : Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum, Tahun 2002.
- , *Kebijakan Aparatur Negara dan Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiil dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Dalam gagasan dan pemikiran tentang pembaharuan Hukum Nasional, Volume III. Jakarta : Tim Pakar Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Tahun 2002.
- Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Penerbit Alumni Ahaem Petehaem Tahun 1996.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta : CV Akademikia Pressindo. Tahun 1985.
- Sugandhi R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya*. Surabaya : Penerbit. PT Usaha Nasional Tahun 1980.
- Subekti. R, dan R. Tjitrosoedibio. R, *Kamus Hukum*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Wiyono R., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Surabaya : Penerbit. PT Alumni. Tahun 1974.
- Widjojo Seman, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Korupsi pada Jajaran Pemerintahan Daerah Pencegahan dan Pemberantasannya*. Disajikan pada seminar nasional dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Jakarta : 9 Desember 2005.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Indonesia; Undang-Undang Dasar 1945 ;

....., Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

....., Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

....., Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

....., Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Keku-
asaan Kehakiman.

C. Media Massa

<https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-kusumaatmadja/>

<http://yudaeka793.blogspot.co.id/2014/06/peranan-hakim-pada-proses-penemuan.html>

<https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-kusumaatmadja>